KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

6FCFGMGJ

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

K							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 1 4 7 4 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 0 7 7 9 0 9 8 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RIRIES CHOIRU PRAMULIA YUDIA							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5	21-402-01	5.876.280	5.876.280	0	5	293.814	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal O 9 dd O 5 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.4 Tanggal		0 9 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penan	: ndatangan :	HARI JUMADI	2 0 2 2 yyyy				
C.6 Pernyataan \	•		ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	ı berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	s mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	